

Konstruksi Ideologi dan Hegemoni dalam Cerpen-Cerpen Koran: Kelindan Pemikiran Louis Althusser dan Antonio Gramsci

Elvira Damayanti ^{a,1*}, Akhmad Tabrani ^{a,2}

^a Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Malang

* Corresponding author: eldamaz9@gmail.com

Tahapan Artikel	Diterima: 17 September 2025	Direvisi: 1 November 2025	Tersedia Daring: 8 November 2025
ABSTRAK			
Cerpen koran merupakan salah satu karya sastra yang vokal dalam membahas permasalahan kenegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah ideologi dan hegemoni dalam tiga cerita pendek surat kabar terbitan Jawa Pos dan Kompas selama 10 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan politik sastra. Cerpen yang diteliti adalah <i>Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)</i> karya Ida Fitria (2023), <i>Presiden Jebule</i> karya Budi Darma (2016), dan <i>Pengacara Pikun</i> karya Gerson Poyk (2013). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat, kemudian dianalisis menggunakan ideologi teori Louis Althusser dan teori hegemoni Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga cerpen tersebut mewakili aparat represif (RSA) dengan kelompok yang dominan adalah negara, pemerintah dan aparat RSA, tercermin dalam cerpen <i>Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)</i> dan <i>Presiden Jebule</i> melalui adanya pembunuhan kelompok dan pencambukan Disusul oleh kelompok perlawanan yang melakukan perlawanan serupa. Selain itu, dalam cerpen-cerpen tersebut juga terdapat aparat ideologi (ISA), yang tercermin pada ketiga cerpen di atas yang bekerja melalui proses penerimaan dari kebiasaan pergaulan, buku, orang tua dan masyarakat melalui ideologi tentang pernikahan dini, cara memperoleh dan melanggengkan kekuasaan, kritik terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kepadatan penduduk, serta cara memperlakukan koruptor.			
Kata Kunci	Althusser,cerpen koran, Gramsci, hegemoni, ideologi		
ABSTRACT			
Newspaper short stories are one of the literary works that are vocal in discussing state issues. This research aims to dissect ideology and hegemony in three newspaper short stories published by Jawa Pos and Kompas over the past 10 years. This research is qualitative-descriptive research with a literary politics approach. The short stories studied are <i>Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)</i> by Ida Fitria (2023) <i>Presiden Jebule</i> by Budi Darma (2016), dan <i>Pengacara Pikun</i> by Gerson Poyk (2013). Data was collected using reading and note-taking techniques. Then analyzed using ideological theory Louis Althusser and Antonio Gramsci's theory of hegemony. The research results show that the three short stories represent the repressive apparatus (RSA) with the dominant groups being the state, government and the RSA apparatus, reflected in the short story <i>Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)</i> and <i>Presiden Jebule</i> through the existence of group murder and flogging This was followed by resistance groups who carried out similar resistance. Apart from that, in these short stories, there is also an ideological apparatus (ISA), reflected in the three short stories above which works through a reception process from social habits, books, parents and society through ideology about early marriage, how to gain and perpetuate power, criticism of the availability of jobs and population density, as well as how to treat corruptors.			

Keywords	Keywords <i>Althusser, Gramsci, hegemony, ideology, newspaper short stories</i>
-----------------	---

PENDAHULUAN

Sastra dan kekuasaan menunjukkan eksistensinya sebagai dua hal yang berkelindan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kekuasaan yang berlaku di suatu kolektif masyarakat tertentu dapat dikritisi melalui media sastra. Sebaliknya, sastra dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam menjalankan sebuah kekuasaan (Taufiq dalam Kalimetro, 2024).

Membahas tentang kekuasaan, tentunya tidak terlepas dari peran ideologi dan hegemoni. Ideologi dalam pandangan Althusser berusaha mencari alternatif jalan ketiga antara dogmatisme stalinis (ideologi marxis-sosialis yang dicetuskan oleh Stalin) dan kritik kanan terhadap dogma tersebut (Althusser, 2015). Sebagai seorang yang juga dipengaruhi aliran marxis, gagasan-gagasannya banyak bersandar pada ideologi marxisme. Melalui proses pembacaannya terhadap pola pikiran Karl Max, Althusser melalui ideologi aparatus negaranya menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini, terdapat dua cara ideologis dalam menaklukkan satu kelas tertentu untuk dieksploitasi, juga mempertahankan dominansi kelas superior. Pertama, dengan cara kekerasan dan kedua, melalui injeksi kesadaran yang diatur sedemikian rupa agar tampak terjadi secara alami (Romadona, 2020). Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Barker (2004) bahwa proses ideologis itu berlangsung di belakang masyarakat, bukan terang-terangan. Dalam proses produksi ideologis itu, terdapat salah satu aspek yang memegang peranan penting, yakni bahasa. Bahasa berkedudukan sebagai bahan subjektivisasi agen (Kang, 2018).

Tidak hanya ideologi, kekuasaan juga berelasi erat dengan hegemoni. Salah satu tokoh pencetus pandangan hegemoni yang paling terkenal adalah Antonio Gramsci. Hegemoni dalam pandangan Gramsci secara umum merepresentasikan sebuah dominasi kekuasaan superior terhadap inferior yang secara spesifik berkonsentrasi pada aspek politik dan ekonomi (Almkhelif, 2021). Kondisi ini membuat kajian hegemoni lekat dengan ideologi kapitalisme. Dominasi kekuasaan yang cenderung mengarah kepada dua aspek tersebut menunjukkan bahwa subyek yang kapabel untuk melakukannya adalah masyarakat politik, dengan kata lain negara (Siswati, 2018). Sejalan dengan realita yang terjadi, negara umumnya memegang kendali terhadap rakyatnya. Walaupun di satu sisi, rakyat juga memiliki hak untuk terlibat dalam praktik bernegara. Gramsci (2010) menderivasikan hegemoni menjadi beberapa aspek, yaitu budaya, ideologi, negara, intelektual, *common sense* (kebiasaan populer). Aspek intelektual secara spesifik dikelompokkan kembali menjadi intelektual organik dan tradisional. Kelas intelektual organik merupakan organisator politik monopolis (yang disebut sebelumnya sebagai superior), sedangkan kelas intelektual tradisional

memposisikan diri sebagai kelas sosial yang independen dan tidak monopolis (Rachman & Supratno, 2022).

Secara praktis, konstruksi hegemoni ini berkelindan dengan ideologi. Hegemoni berhubungan dengan cara penyebaran ideologi (Ghazalba, 2020). Sejalan pula dengan pendapat Febriani & Hamdi (2024) yang menyebutkan bahwa terdapat ideologi dibalik hegemoni yang perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan. Hubungan antarkeduanya salah satunya tampak pada peran bahasa sebagai media melancarkan proses kerja ideologi untuk melegitimasi kekuasaan yang diinginkan. (Merriam & Saksono, 2022; Mubaligh, 2011). Potret relasi ini tidak hanya ditemukan dalam aktivitas-aktivitas politis dalam dunia nyata, tetapi juga dalam sastra.

Sastra sebagai manifestasi produk berbahasa dengan muatan estetika dan simbolisme menjadi salah satu wahana bagi penggambaran ideologi dan hegemoni. Hal ini disebabkan karena sastra memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, ideologi dan hegemoni menghadirkan perspektif baru yang mengindikasikan kekuatan sastra pada titik sosial, politik, dan budaya yang independen, bukan dependen (Latifah & Putra, 2020; Sabrina & Nurholis, 2024). Independensi sastra melalui kekuatannya itu kemudian memunculkan sebuah pendekatan baru di dunia kesusasteraan, yaitu politika sastra (Taufiq, 2024).

Karya-karya sastra bermuatan ideologi-hegemoni telah banyak berkembang, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Salah satunya adalah cerpen berjudul *The Garden Party* karya Katherine Mansfield (1921). *The Garden Party* dengan salah satu tokohnya yang paling menonjol, Laura, mengisahkan tentang cara pandang kelas atas (orang kaya) terhadap kelas rendah (orang miskin). Tokoh Laura menunjukkan perubahan sikap yang disebabkan oleh interpretasi ideologis dari apa yang telah di alaminya pada sebuah acara pesta itu. Di Indonesia sendiri, terdapat sebuah kumpulan cerpen berjudul *Iblis Tidak Pernah Mati* karya Seno Gumira Ajidarma (1999). Kumpulan cerpen ini memuat eksistensi ideologi kapitalisme yang dihadapkan dengan ideologi lain, seperti sosialisme, demokrasi, dan humanisme, yang salah satunya diwakili oleh tokoh bernama Paman Gober (Nurhadi, 2004). Karya ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap situasi masyarakat Indonesia di era tersebut sebagai akibat dari legitimasi kelas dominan (superior).

Dalam penelitian ini, cerpen yang akan dikaji adalah tiga cerpen pilihan yang dimuat dalam portal berita daring Jawa Pos dan Kompas, yakni cerpen *Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)* karya Ida Fitria (2023), *Presiden Jebule* karya Budi Darma (2016), dan *Pengacara Pikun* karya Gerson Poyk (Poyk, 2013). Cerpen-cerpen tersebut dipilih sebagai bahan kajian karena secara substansi memuat ideologi dan hegemoni yang dikemas berdasarkan realita kehidupan di negara Indonesia.

Selain itu, pemilihan cerpen dengan tahun yang berbeda tersebut dilakukan guna mengetahui pergeseran maupun perkembangan karya sastra ideologis-hegemonis di Indonesia 10 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2013-2023. Penelitian ini merupakan upaya strategis untuk mengidentifikasi kelindan antara ideologi dan hegemoni dalam karya sastra dari waktu ke waktu. Sebagai bentuk kritik, penelitian juga dapat memberikan gambaran bagaimana kelas-kelas dominan di Indonesia menciptakan sebuah legitimasi bagi kelas di bawahnya dalam konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih jauh, penelitian juga menjawab pertanyaan bagaimana dampak ideologi dan hegemoni dalam cerpe-cerpen tersebut dan interpretasinya dalam dunia nyata.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian tersebut menjadi referensi dalam menentukan keterbaruan penelitian ini. Salah satunya berjudul *Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan* oleh M. Ahsana Ghazalba. Penelitian ini menggunakan tradisi shalawatan masyarakat Jawa sebagai objeknya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa shalawatan sebagai sastra populer merupakan gagasan ideologis yang memiliki sifat persuasif, identitas, penghargaan, dan sanksi dalam membentuk masyarakat Jawa yang bermoral, beretika, dan religius (Ghazalba, 2020). Penelitian kedua berjudul *Representasi Konflik Politik 1965: Hegemoni dan Dominasi Negara dalam Cerpen Susuk Kekebalan karya Han Gagas* oleh Hari Sulistyo. Penelitian ini berfokus pada bentuk aparatus dalam sebuah cerpen hegemonik. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah Han Gagas sebagai pengarang menggambarkan cerita sejarah mengenai peristiwa konflik 1965, situasi ketika kelompok yang berideologi resisten ditumpas oleh ideologi dominan (Sulistyo, 2018). Adapun kelompok ideologi resisten yang dimaksud adalah pelaku seni reog BRP, sedangkan kelompok ideologi dominan adalah negara (pemerintah). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya berusaha mengidentifikasi ideologi maupun hegemoni, tetapi juga membedah kelindan antarkeduanya. Dengan demikian, cara kerja ideologi dalam membentuk hegemoni, beserta implikasinya dalam realita dapat dapat diungkap secara mendalam. Melalui penelitian ini pula, sastra dapat menunjukkan fungsinya sebagai media kritis, juga inspirasi politis.

METODE

Bagian Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif-kualitatif dengan pendekatan politika sastra. Politik sastra sebagai sebuah pendekatan baru dalam dunia kesusasteraan dapat menjadi wadah yang lebih independen dibandingkan sosiologi sastra yang telah memuat banyak aspek-aspek sosial. Pendekatan politika sastra ini digunakan agar kajian berfokus kepada isu-isu politis tertentu (Taufiq, 2024), dalam konteks penelitian ini adalah ideologi dan hegemoni. Data dalam penelitian ini adalah kutipan cerita bermuatan ideologi dan hegemoni dalam

cerpen berjudul *Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)* karya Ida Fitria (2023), *Presiden Jebule* karya Budi Darma (2016), dan *Pengacara Pikun* karya Gerson Poyk (2013). Data dikumpulkan dengan membaca setiap bagian cerita secara intensif, kemudian mencatat temuan-temuan penting di dalamnya. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teori Louis Pierre Althusser dan Antonio Gramsci. Teori Althusser digunakan untuk mengidentifikasi cara kerja dan makna ideologi dalam cerpen, sedangkan teori hegemoni digunakan untuk membedah bentuk-bentuk hegemoni sebagai akibat dari eksistensi ideologi tersebut. Penafsiran data dalam penelitian ini tidak hanya terbatas secara tekstual, tetapi juga intertekstual untuk mengimajinasikan fungsi cerpen-cerpen tersebut dalam kekuasaan bernegara, begitu juga sebaliknya. Setelah data dianalisis dan ditafsirkan, dilakukan pemeriksaan kembali dan penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerpen Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)

Bagian *Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)* merupakan sebuah cerpen yang berlatar kota Lhokseumawe. Dikisahkan dalam cerpen ini bahwa Lhokseumawe merupakan salah satu kota di sebuah negara yang baru saja mengeleksi Presidennya. Walau demikian, proses eleksi tersebut tidak menjawab permasalahan yang terjadi di berbagai daerahnya. Salah satunya di wilayah Lhokseumawe, sebuah wilayah yang lekat dengan kasus penculikan oleh orang tak dikenal, kontak senjata antara GAM, bahkan pencurian kabel listrik.

Cerpen ini juga mengisahkan konflik terakhir di wilayah tersebut, seperti penebangan pohon dan pemadaman listrik. Ditengah konflik tersebut, digambarkan aparat (dalam judul disebut sebagai Komisi Kebenaran) yang bobrok. Kebobrokan tersebut digambarkan melalui lemahnya penanganan terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi. Kebobrokan aparat negara, dalam hal ini polisi, salah satunya tampak pada kutipan cerpen berikut ini.

"Sebenarnya ada cukup banyak ihwal lainnya, namun hanya satu yang sama: tentang korban sangat jelas dan terang benderang hingga keluarganya siapa kita tahu, tapi tak ada kejelasan tentang pelaku, wajah pelaku seperti tak berbentuk. Sudah sampai di mana usaha komisioner menemukan wajah pelaku? Atau sudah adakah kasus yang dilimpahkan ke pengadilan? Tidak ditemukan satu ihwal pun tentang itu. Sebenarnya Komisi Kebenaran mencari kebenaran untuk siapa?"

Kutipan di atas menjelaskan cara kerja aparat negara, yang meliputi polisi dan tentara dalam memandang sebuah kasus. Ditunjukkan melalui kutipan tersebut, terdapat beberapa kasus yang menghilangkan nyawa, seperti tewasnya seorang gadis yang berdarah selangkangannya, tertembaknya seorang mahasiswa di minibus L-300, dan beberapa lainnya. Umumnya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, aparat melakukan penyidikan, yang salah satu tujuannya

adalah mencari pelaku dan juga mengidentifikasi identitas korban. Namun, kutipan cerpen di atas menunjukkan bahwa, masyarakat setempat dapat memiliki informasi lengkap mengenai korban dan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat tidak memiliki informasi yang jelas mengenai pelaku. Padahal, dalam berbagai kasus, tentu pelaku menjadi seorang yang diburu untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktransaparan aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil.

Menurut teori ideologi cetusan Althusser, kondisi tersebut merepresentasikan aparatus represif. Aparatus represif cenderung menggunakan kekerasan dan bersifat kasat mata, bersifat menindas juga memeras, yang umumnya diwakili oleh eksistensi pemerintahan, pengadilan, kepolisian, dan sejenisnya (McDevitt, 2022). Artinya, aparat dan sosok pemimpin dibalikinya sebagai kelas superior memanfaatkan kontak fisik untuk melemahkan kelas inferior, dalam hal ini hingga menyebabkan tewasnya orang-orang tertentu. Dalam praktik hegemoninya, kelas di atas umumnya memiliki sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh sesamanya. Tentunya, hal ini dilakukan atas dasar pertahanan kekuasaan yang ada. Di sisi lain, dalam pandangan Gramsci, kekuasaan yang dilegitimasi secara represif memiliki kecenderungan untuk memunculkan adanya pemberontakan oleh kelompok resisten. Dalam cerpen ini, resistensi ditunjukkan oleh keberadaan sebuah berita yang mengungkap kasus yang melibatkan Komisi Kebenaran. Berita tersebut tentunya mencoreng nama baik penguasa dan dapat memunculkan percikan-percikan perlawanan lainnya. Secara tidak langsung, media masa dapat disebut sebagai media perlawanan rakyat terhadap kelas dominan, yakni Komisi Kebenaran itu sendiri. Pernyataan tersebut didukung oleh kutipan berikut ini.

“Mataku mengeja huruf yang menjadi berita utama, KOMISI KEBENARAN TERLIBAT SPPD FIKTIF TAM TARAM TAM. Tanpa sengaja aku memegang bagian belakang kepala, akhirnya keluar di koran juga. Hal-hal busuk, disembunyikan bagaimanapun, aromanya akan tercium juga.”

Dalam cerpen ini, terdapat sebuah muatan aparatus lain yang merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Aparatus ini berhubungan dengan pernikahan dini. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan menjadi hal yang lumrah dan dinormalisasikan oleh sebagai besar kelompok masyarakat. Pernikahan dini dalam cerpen ini digambarkan melalui kutipan berikut.

“Huss! Bulan depan Aisha enam belas, sudah bisa dikawinkan.”

Usia 16 tahun berdasarkan kutipan cerpen di atas adalah usia yang sudah layak untuk menikah. Walau nyatanya, seseorang dengan usia 16 tahun masih tergolong sangat muda sehingga pernikahan yang dilakukan dapat disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini bukan hal yang tabu, justru sebaliknya.

konsepsi ini telah tumbuh dan hidup di masyarakat sejak puluhan tahun lalu dan telah dilakukan sebagai sebuah budaya. Sebagai akibat dari pelanggaran terhadap pernikahan dini, misalnya belum menikah di usia 20 tahun lebih, biasanya seseorang akan menerima cibiran dari lingkungannya. Pernyataan tersebut menunjukkan kapabilitas aparatus ideologi dalam mengikat sebuah kolektif masyarakat.

Dalam cerpen *Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase)* ini, digambarkan kondisi sosial masyarakat Lhokseumawe yang masih taat terhadap konsepsi tersebut. Hal ini menunjukkan eksistensi ideologi yang cukup kuat dalam masyarakat. Dalam pandangan Althusser, kutipan di atas merepresentasikan aparatus ideologi. Ideologi sejenis ini dapat memunculkan sebuah paksaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang kemungkinan tidak diinginkan. Sama halnya dengan Aisha dalam cerpen ini. Sebagai sebuah ideologi tentunya terdapat sebuah kekuasaan yang memegang kendali sehingga konsepsi ini langgeng hingga saat ini. Adapun dalam konteks ini, kekuasaan merujuk kepada kolektif masyarakat itu sendiri, yang terus meyakini dan melanggar pernikahan dini. Konsepsi ideologi pernikahan dini ini juga merupakan representasi dari interpelasi ideologis. Beberapa pelaku pernikahan dini misalnya, tidak menyadari secara jelas apa yang dilakukannya karena menganut keyakinan bahwa wewenang utama berada di tangan orang tua. Ideologi ini selanjutnya membentuk sebuah hegemoni kultural, yang dalam praktiknya menunjukkan ada beberapa pihak yang dirugikan. Dalam kasus Aisha, maka Aisha lah yang paling dirugikan. Walau demikian, dalam cerpen ini ditunjukkan sebuah penolakan terhadap ideologi pernikahan dini. Hal tersebut dilakukan oleh Bapak Aisha sebagaimana kutipan berikut.

"Apa? Tidak! Tidak! Aisha akan kuliah di Banda Aceh." Bapak berlagak sewot."

Sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Aisha menunjukkan sebuah penolakan terhadap aparatus ideologi yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya transisi oleh subjek-subjek tertentu dalam menghadapi sebuah hegemoni yang berkuasa. Bapak Aisha dalam hal ini dapat disebut sebagai *sang pengubah* yang melalui transisinya dapat membawa kemakmuran dalam masyarakat (Romadona, 2020).

Cerpen Presiden Jebule

Cerpen *Presiden Jebule* karya Budi Darma dibuka dengan penggambaran kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Di wilayah itu, lahir sebuah bayi bernama Jebule dari seorang ibu dengan bantuan dukun bayi buta huruf. Walau buta huruf, dukun tersebut memiliki bayaran yang prestis, yakni gula jawa, barang berharga dan mahal. Jebule digambarkan sebagai sosok yang cerdas sehingga apa yang dilihatnya dapat menjadi pelajaran baginya. Kecerdasan itulah yang menggiring keberhasilan Jebule menjadi seorang presiden, meskipun

menggunakan cara yang tidak baik. *Presiden Jebule*, dengan tokoh utamanya yang bernama Jebule memiliki muatan-muatan ideologi yang kental. Salah satunya tampak pada kutipan beriku ini.

“Tempat tidur Jebule selalu morat-marit, ditumpuku berbagai macam buku: ada buku Machiavelli The Prince, mengenai bagaimana cara mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, ada buuku filsof Thomas Hobbes Leviathan, mengenai keharusan seorang pemimpin untuk selamanya bertambah kuat, dan buku-buku mengenai kehidupan jenderal-jenderal besar. Tentu saja, buku-buku tentang kejatuhan para diktator juga ada.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Jebule dalam kehidupannya bersinggungan dengan aparatus ideologi. Aparatus ideologi merupakan kebalikan dari aparatus represif. Aparatus ideologi atau yang dikenal dengan ISA tidak melibatkan kekerasan, melainkan melalui resepsi dari media-media massa, agama, keluarga (Rahmawati, 2019), tak terkecuali buku. Sejalan dengan kutipan di atas, disebutkan bahwa Jebule membaca buku-buku yang relevan dengan kekuasaan. Pada saat membaca, Jebule secara tidak langsung mengalami sebuah resepsi yang memengaruhi cara bertindak dan cara berpikirnya.

Proses resepsi terhadap isi buku ini didukung pula dengan proses resepsinya terhadap tukang sulap, rombongan kuda lumping, dan lain sebagainya. Adapun ideologi yang diresepsi Jebule dalam dari aktivitas jalanan itu adalah kecerdikan dan kebohongan. Dengan cara menerapkan ideologi ini, Jebule berhasil meraih kedudukan sebagai seorang presiden. Dalam melanggengkan kekuasaannya, Jebule menerapkan aparatus ideologi dengan mengeluarkan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Di satu sisi, kepemimpinan Jebule juga menunjukkan aparatus represif karena siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa kekerasan. Hal-hal yang sedemikian rupa diperoleh Jebule melalui buku-buku yang menjadi bacaannya. Jebule kemudian juga dikenal sebagai seorang presiden yang melegitimasi kekuasaannya dengan cara represif. Pernyataan tersebut didukung oleh kutipan berikut ini.

“Dan mereka yang botak harus memakai wig model mutakhir potongan rambut Jebule, termasuk mereka yang botak akibat kemo, dan yang pura-pura botak akan dihukum cambuk di depan khalayak.”

Peraturan yang dibuat Jebule ini menghemoni rakyatnya untuk selalu patuh terhadap dirinya. Ditinjau dari teori Gramsci, aparatus represif yang dipraktikkan Jebule ini memiliki sebuah kelemahan, yakni rentan akan perlawanan dan memunculkan kelompok-kelompok resisten. Dalam cerpen ini, kelompok resisten diwakili oleh rakyat Jebule sendiri yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Pemberontakan tersebut tampak pada kutipan cerita berikut ini.

“Tapi rakyat adalah rakyat, dan penindasan adalah penindasan. Maka, ketika Jebule dan pembesar-pembesar kuncinya melawat ke Mesir, rakyat berontak. Dalam perjalanan pulang, pilot pesawatnya agak kuranga ajar. Dengan sengaja, pesawat diputar-putar, supaya Jebule dapat melihat, bahwa rakyat sedang membakar ibukota. Dan ketika pesawat mendarat, borgol dan mulut-mulut senjata menyambut Jebule dann pembesar-pembesar kunci.

Cerpen Pengacara Pikun

Sesuai dengan judulnya, cerpen *Pengacara Pikun* mengisahkan kehidupan seorang pengacara bernama Lell Hanack. Di suatu hari, Lell Hanack kedatangan Dewi dan Herman yang akan bekerja bersamanya. Dewi dan Herman sebenarnya adalah sarjana hukum. Namun, keduanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan di daerah sehingga harus berpindah ke kota. Bersama Lell Hanack, Dewi menjadi sekertaris pengacara dan Herman menjadi sopir. Sebagai seorang yang telah berusia lanjut, Lell Hanack telah pikun dan seringkali membingungkan Dewi dan Herman. Hingga akhirnya ia meninggal dunia di WC.

Cerpen *Pengacara Pikun* ini memuat banyak kritik terhadap kondisi sebuah negara yang disebut Indonesia. Salah satunya tampak pada kutipan berikut ini.

“Oh, Tuhan, tiap tahun universitas di Indonesia bertelur dan menetasakan ribuan sarjana hukum, tapi sarjana hukum bagaikan anak ayam yang menciap-ciap kelaparan tak ada pekerjaan.”

Kutipan cerpen di atas merupakan sebuah kritik terhadap kondisi sarjana hukum di Indonesia dengan kuantitas yang sangat besar, tetapi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Jika ditelusur melalui pandangan Althusser, kutipan di atas merepresentasikan aparatus ideologis. Melalui hal ini, cerpen *Pengacara Pikun* menjadi media ideologis yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan dan menggerakkan ideologi tersebut. Selain kritikan terhadap miskinnya lapangan pekerjaan bagi sarjana hukum di Indonesia, cerpen ini juga membuat kritikan terhadap kondisi kota Jakarta.

Kota Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia digambarkan sebagai tempat yang sangat padat sehingga menyulitkan pergerakan. Hal ini dapat dilihat melalui kondisi lalu lintasnya. Herman, salah satu tokoh dalam cerita ini menjadi salah satu orang yang memberikan kritik dengan balutan rekomendasi. Menurut Herman, pemerintah harus bergerak untuk mengoptimalkan program transmigrasi baru. Kritik yang disampaikan oleh Herman ini dapat digolongkan sebagai aparatus ideologi. Dalam hal ini, herman berusaha untuk menunjukkan pertentangannya terhadap kelas dominan, sebagai pemegang wewenang, yakni pemerintah atau negara. Kritik tersebut tampak melalui kutipan berikut.

“Pemerintah harus membuat program transmigrasi baru, dengan memberi uang kepada insinyur dan petani untuk bisa memenuhi kebutuhan maksimum transmigran dalam membangun desa-desa transmigrasi di daerah yang kosong.”

Dua kutipan yang merepresentasikan aparatus ideologi ini membentuk subjek-subjek yang di kemudian hari akan bergerak untuk menuntut perubahan atas kondisi yang ada. Secara spesifik, menuntut perubahan terhadap kondisi lapangan pekerjaan bagi sarjana hukum dan kepadatan penduduk di kota besar seperti Jakarta. Subjek tersebut akan terhegemoni menjadi sebuah kelompok inferior yang memberikan perlawanan kepada kelompok superior dan dominan, yakni negara. Melalui aparatus ideologi ini, subjek-subjek akan dihegemoni melalui proses resepsinya terhadap ideologi yang disebarkan sehingga tidak ada unsur paksaan. Menurut Gramsci, legitimasi yang sedemikian rupa akan memperkuat dan melanggengkan kuasa yang ada.

Lebih lanjut, cerpen ini juga membahas mengenai kondisi antara pengacara dan koruptor. Koruptor dianggap sebagai satu-satunya orang yang banyak membutuhkan pengacara kini guna membantu menyelesaikan kasus-kasusnya. Namun demikian, tokoh Opa menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konsep “pengacara membela koruptor”.

“Jangan membela koruptor, ganyang koruptor dengan memasang tarif tinggi..”

Pernyataan tokoh Opa di atas secara tidak langsung merepresentasikan aparatus ideologi yang ditujukan kepada tokoh Dewi dan Herman. Dengan cara memasang tarif tinggi, maka sesungguhnya para pengacara dapat turut memberikan pelajaran dan sanksi pada mereka yang telah merugikan negara. Ideologi ini dapat diresepsi oleh tokoh Dewi dan Herman, lalu dipraktikkan dalam kehidupannya kelak ketika telah resmi menjadi pengacara. Praktik aparatus ideologis yang dilakukan tokoh Opa ini dapat membangun sebuah hegemoni tertentu. Hegemoni yang dimaksud terdiri dari para pengacara yang memasang tarif tinggi demi semakin menyulitkan koruptor. Dalam jangka panjang, ideologi ini dapat mengikis bahkan menghilangkan praktik korupsi yang menjadi kebiasaan sebagian pejabat di Indonesia.

SIMPULAN

Tiga cerpen yang dikaji mewakili cerpen-cerpen lain yang dipublikasikan dalam rentan waktu tahun 2013 hingga 2023. Ditinjau dari muatan ideologinya, cerpen-cerpen di atas mengandung baik aparatus represif (RSA) yang lekat dengan kekerasan, maupun aparatus ideologi (ISA) yang lekat dengan cara halus. Adapun kelas superior dan dominan yang paling banyak disinggung dalam tiga cerpen di atas adalah negara, pemerintahan, dan aparat. Walau terdapat satu kelas dominan berupa masyarakat dan orang tua pada bahasan tentang pernikahan dini.

Adapun aspek-aspek yang dibahas dalam cerpen berkaitan dengan kelas superior di atas adalah tentang kekerasan yang dilakukan dan merugikan rakyat sebagai kelas inferior. Namun, dalam cerpen-cerpen di atas ditunjukkan bahwa baik aparat reseptif maupun ideologis, masing-masing memiliki subjek sebagai kelompok resisten yang berusaha untuk menggugurkan legitimasi kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kekuasaan akan diiringi oleh kelompok perlawanan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui pula bahwa tiga cerpen yang muncul di tahun berbeda cenderung mempermasalahkan dan mengkritik hal yang sama, yaitu bagaimanakah kondisi sebuah negara, secara spesifik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 10 tahun itu, Indonesia mengalami stagnansi. Stagnansi ini ditunjukkan melalui munculnya berbagai permasalahan yang tak kunjung selesai akibat dari sebuah kekuasaan tertentu. Jika ditinjau secara diakronis, permasalahan ideologi dan hegemoni dalam tiga cerpen di atas menunjukkan level yang semakin tinggi. Hal ini dapat menjadi media koreksi bagi aparat negara untuk berbenah. Sejalan dengan konsep pendekatan politika, tiga cerpen koran di atas dapat dijadikan inspirasi dalam berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidarma, S. G. (1999). *Iblis Tidak Pernah Mati*. Galang Press.
- Almkhelif, S. N. M. (2021). Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences. *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 186–199. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.15>
- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara* (C. H. Pontoh (ed.)). IndoProgress.
- Barker, C. (2004). The Sage Dictionary of Cultural Studies. In *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446221280>
- Darma, B. (2016). Presiden Jebule. *Kompas*. <https://ruangsastra.com/3583/presiden-jebule/>
- Febriani, R., & Hamdi, I. (2024). Soft Power & Hegemony: Gramsci, Nye, and Cox's Perspectives. *Jurnal Filsafat*, 34(1), 86. <https://doi.org/10.22146/jf.87478>
- Fitria, I. (2023, November 26). Komisi Kebenaran (Sebuah Reportase). *Jawa Pos*.
- Ghazalba, M. A. (2020). Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study ff The Ideology of Althusser and Gramsci's Hegemony). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/nusa.15.1.105-117>
- Gramsci, A. (2010). Selection from the Prison Notebooks. In Q. Hoare & G. N. Smith (Eds.), *International Journal of Cultural Policy* (Vol. 16, Issue 1). International Publishers Co.

- Kalimetro, K. (2024). *Politika Sastra - Hubungan Sastra dan Kekuasaan Politik?! | #podcastro Komunitas Kalimetro Bersama*. YouTube.
- Kang, K. D. (2018). Language and ideology: Althusser's theory of ideology. *Language Sciences*, 70, 68–81. <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2018.06.008>
- Latifah, S., & Putra, C. R. W. (2020). the Representation of Power Hegemony in the Colonial and New Order Era in “Balada Supri” Novel. *Leksema: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 5(1), 65–82. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v5i1.2107>
- Mansfield, K. (1921). *The Garden Party*. In *The Garden Party and Other Stories*. Penguin Classic.
- McDevitt, T. (2022). Power Is a Form of Wealth: Repressive and Ideological State Apparatus in the Power. *Tcnj Journal of Student Scholarship*, XXIV(April), 1–9.
- Merriam, & Saksono, L. (2022). Hegemoni Budaya pada Teks Naskah Drama Dantons Tod Karya Geog Büchner. *Identitaet*, 11(1).
- Mubaligh, A. (2011). Relasi Bahasa dan Ideologi. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 5(2). <https://doi.org/10.18860/ling.v5i2.622>
- Nurhadi. (2004). Iblis Tidak Pernah Mati Karya Seno Gumira Ajidarma: Analisis hegemoni Gramsci. *Litera*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ltr.v3i2.6768>
- Poyk, G. (2013). Pengacara Pikun. *Kompas*.
- Rachman, A. T. V., & Supratno, H. (2022). Perlawanan Kaum Intelektual Terhadap Kekuasaan Dalam Novel Kelomang Karya Qizink La Aziva: Kajian Hegemoni Gramsci. *Sapala*, 9(2), 56–67.
- Rahmawati, E. (2019). Reproduksi Ideologi dalam Cerpen “Mardijkek” Karya Damhuri Muhammad. *Eufoni*, 2(1), 1. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/1612>
- Romadona, M. T. (2020). Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 197–236. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/9060>
- Sabrina, S. H., & Nurholis, N. (2024). Ideologi dan hegemoni kekuasaan dalam novel Hujan Karya Tere Liye. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.23960/aksara/v25i1.pp1-15>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Sulistyo, H. (2018). Representasi Konflik Politik 1965 dalam Cerpen Susuk Kekebalan karya Han Gagah. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.22146/poetika.35611>
- Taufiq, A. (2024). *Politika Sastra Ruang Diskursif Ideologi dan Imajinasi Politik Kebangsaan* (Cetakan Pe). Madani Penerbit Buku Pendidikan.